

Rp 262 Miliar untuk Bangun 3 Gedung Baru RSUD Mangusada

MANGUPURA, NusaBali

Megaproyek pembangunan gedung baru RSUD Mangusada di Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, sudah masuk dalam proses tender. Pemkab Badung menggelontorkan anggaran Rp 262 miliar lebih untuk pembangunan gedung baru yang rencana terdiri dari blok D, blok F, dan blok G.

Anggaran yang bersumber dari APBD Badung itu bersifat tahun jamak, sehingga diperkirakan pembangunannya bakal tuntas dalam tiga tahun ke depan. *Leading sector* proyek tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung.

Berdasarkan dokumen tender yang terpublikasi di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tender pembangunan gedung D, F, dan G telah dibuka sejak 23 Agustus 2018 lalu. Tender berakhir 5 September 2018 mendatang. Lima hari setelah tender resmi dibuka, sudah ada 26 rekanan yang menyatakan berminat atas proyek tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PUPR Badung IGA Arinda Trisnawati, saat dikonfirmasi membenarkan pembangunan gedung baru RSUD Mangusada sudah berproses di LPSE. "Sudah tender, tinggal menunggu pemenang tender saja, barulah proyek dikerjakan," katanya, Senin (27/8).

Mengingat proyek yang akan dikerjakan tiga gedung sekaligus, maka pembangunannya bersifat tahun jamak.

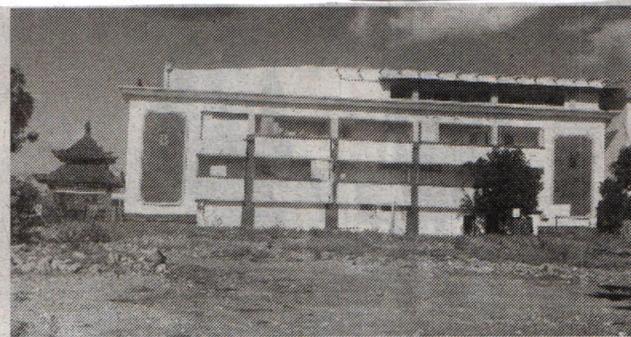
Secara terpisah, Dirut RSUD Mangusada dr Nyoman Gunarta menyambut baik pembangu-

nan gedung baru sudah berproses. Pasalnya, gedung lama sudah lama dibongkar. "Kami berharap proyek bisa segera dikerjakan. Sebab, saat ini rumah sakit masih kekurangan ruang rawat inap untuk pasien," ujarnya.

Dikatakannya, pembangunan gedung baru ini telah disosialisasikan kepada masyarakat umum sejak tahun lalu. Sosialisasi juga dalam rangka memohon permakluman, apabila nanti ada masyarakat yang kurang nyaman saat pembangunan berlangsung.

"Kami harapkan, setelah pembangunan selesai, RSUD Mangusada betul-betul menjadi smart hospital, menjadi rujukan bagi masyarakat, dan menjadi role model bagi rumah sakit daerah lainnya," tukasnya.

Seperti diketahui, ada tiga gedung baru yang akan dibangun, yakni gedung blok D, blok F, dan blok G. Gedung D rencananya akan digunakan untuk poliklinik dengan sistem cluster, dan ruang rawat inap untuk kelas II dan kelas I. Kemudian untuk gedung F dimanfaatkan untuk pusat onkologi pelayanan khusus kanker, ruangan pelayanan eksklusif seperti pelayanan bayi tabung, dan ruangan khusus rawat anak. Ruang penghubung kedua blok ini akan digunakan untuk ruangan operasi emergency. Sedangkan blok G untuk pusat pelayanan cuci darah, dimana saat ini ada 300 pasien yang rutin melakukan cuci darah. Blok ini juga menjadi pusat manajemen, untuk pendidikan dan pengembangan, dapur, serta laundry. **asa**



• IST
LOKASI pembangunan gedung baru RSUD Mangusada di Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi.

Edisi : Selasa, 28 Agustus 2018

Hal : 2



Proyek Pelebaran Jalan Imam Bonjol

Terkendala Utilitas, Target Meleset

Untuk mengejar ketertinggalan, pelaksana proyek akan menambah alat berat. Itu dilakukan setelah PLN dan PDAM selesai merelokasi utilitas masing-masing.

MANGUPURA, NusaBali
Pengerjaan proyek pelebaran Jalan Imam Bonjol di

atas Tukad Teba yang ditarget selesai Desember 2018 saat ini progresnya mencapai 55,578 persen. Progres penggarapan proyek itu saat ini mengalami deviasi -4,44 persen, karena terkendala utilitas PDAM dan PLN.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Simpang Dewa Ruci, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah VIII Ida Bagus Made Artamana, mengungkapkan proyek pelebaran jalan di atas Tukad Teba menggunakan box culvert. Saat ini proyek sepanjang 2 kilometer lebih itu sudah terpasang 668 box culvert atau sekitar 800 meter.

"Untuk pelebaran Jalan Imam Bonjol kami optimis dapat diselesaikan tepat waktu. Saat ini memang tak sesuai rencana. Rencana 60,0256 persen namun realisasinya 55,578 persen. Jadi terjadi deviasi -4,44 persen," ungkap Artamana saat dikonfirmasi, Senin (27/8).

Dikatakannya, pada awal September mendatang pengerjaan akan dikebut. Karena pemindahan utilitas PDAM dan PLN yang menjadi kendala dalam pengerjaan proyek itu akan tuntas. Kini pekerjaan difokuskan pada segmen dua dari setra.

"Utilitas PDAM dan PLN

sudah selesai masalahnya. Tinggal eksekusi lapangan. PLN menyanggupi akan selesai relokasi seluruhnya Senin pekan depan. PDAM akan selesai relokasinya 7 September. Saat ini pihak PLN dan PDAM sedang kebut relokasi utilitasnya masing-masing," lanjutnya.

Guna mengejar ketertinggalan dari rencana awal, pihaknya akan melakukan action plan. Pihaknya berencana pada 7 September akan menambah alat berat. Kini hanya ada satu set alat, akan ditambah menjadi tiga set. "Sehingga akhir Oktober pekerjaan pasang box culvert semuanya selesai. November pekerjaan aspal.

Desember rapi-rapi dan finishing," bebarnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat, terutama pengguna jalan yang melintas di Jalan Imam Bonjol untuk selalu berhati-hati. Diharapkan untuk menyiasati waktu agar tak terlambat sampai tujuan. Karena pada jalur tersebut kini terjadi kemacetan lantaran banyaknya material dan kendaraan proyek.

"Kami mohon maaf karena perjalanan terganggu. Perhatikan rambu-rambu yang telah terpasang, karena terjadi perubahan arus lalu lintas sementara akibat penggarapan proyek ini," tutur Artamana. po

Edisi : Selasa, 28 Agustus 2018

Hal : 2



Pemkab Pangkas Anggaran SKDP

Kekurangan anggaran sebesar Rp 19,05 miliar sudah mulai tertutupi dengan upaya rasionalisasi tersebut.

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng kembali merasionalisasi anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini guna menutup kebutuhan dana sebesar Rp 19,05 miliar pada APBD Perubahan 2018. Masalahnya, dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD 2017, tidak banyak dapat dimanfaatkan.

Data dihimpun, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas APBD tahun



• dok
SEKDAKAB Buleleng Dewa Ketut Puspaka.

2017, total Silpa ditetapkan Rp 93,8 miliar. Sebenarnya Silpa tersebut naik karena Silpa yang dirancang sebelumnya hanya Rp 57,3 miliar.

Meski Silpa cukup tinggi

sebesar Rp 93,8 miliar, ternyata tidak semuanya dapat dipakai untuk program kegiatan yang disusun oleh daerah. Karena berdasarkan regulasi dari pusat, mulai tahun 2018, Silpa yang sumber dananya dari pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dimanfaatkan lagi untuk kegiatan yang sama. Nah, konon Pemkab Buleleng hanya bisa memanfaatkan Silpa tersebut sebesar Rp 265 juta.

Disisi lain, Pemkab Buleleng sebelumnya telah merancang pemanfaatan Silpa tersebut sebesar Rp 19,23 miliar lebih. Sehingga Pemkab kini harus memutar otak mencari tambahan dana sekitar Rp 19,05 miliar guna menutup kekurangan tersebut.

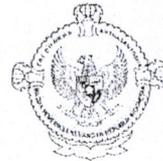
Sekdakab Buleleng Dewa Ketut Puspaka, saat dikonfirmasi Minggu (26/8), membenarkan ada upaya rasionalisasi ang-

garan OPD di APBD Perubahan 2018. Namun Puspaka menyebut, rasionalisasi itu hal yang biasa dilakukan ketika ada kebutuhan dana yang mendesak. "Disinilah seninya menyusun anggaran. Karena langkah rasionalisasi itu juga untuk menyeimbangkan postur anggaran antara belanja langsung dan belanja tidak langsung," katanya.

Menurut Puspaka, saat ini kekurangan anggaran sebesar Rp 19,05 miliar sudah mulai tertutupi dengan upaya rasionalisasi tersebut. Upaya dilakukan dengan efisiensi dan upaya penyesuaian-penyesuaian. Salah satunya disebutkan efisiensi belanja pegawai sebesar Rp 10 miliar. "Prinsipnya anggaran sudah mulai klop, karena TAPD secara langsung lakukan pendekatan dengan OPD. Sehingga tidak mengganggu program-program yang sudah disusun dengan baik oleh OPD," terangnya. **k19**

Edisi : Senin, 27 Agustus 2018

Hal : 4



Berkas Dua Tersangka Susulan Belum Lengkap

NEGARA, NusaBali

Pasca sidang putusan terhadap PNS Pemkab Jembrana, Indah Suryaningsih, 48, di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (2/8) lalu, penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Jembrana melanjutkan pengajuan berkas dua tersangka lainnya ke Kejari Jembrana, yang sama-sama berkaitan kasus korupsi dana santunan kematian Pemkab Jembrana tahun 2015. Untuk sementara berkas kedua tersangka yang sama-sama mantan Kelian Dinas di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Jembrana, itu masih dinyatakan P-18 (hasil penyelidikan belum lengkap).

Hal itu diakui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus)

Kejari Jembrana, Ivan Praditya Putra, Jumat (24/8). Diakuinya, jika berkas kedua tersangka, itu diajukan penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Jembrana sekitar seminggu lalu. Berkas kedua tersangka itu pun sudah rampung diteliti jajaranya, dan sementara masih belum lengkap. "Masih P-18. Rencananya untuk P-19 (pengembalian berkas untuk dilengkapi penyidik), kami lakukan minggu depan," katanya.

Ivan yang juga baru seminggu resmi menjabat Kasi Pidsus Kejari Jembrana, ini enggan merinci kekurangan dari berkas kedua tersangka itu. Yang jelas, menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dilengkapi penyidik, dan sejumlah catatan

kekurangan terhadap berkas itu juga sudah disusun untuk P-19 nanti. "Nanti tunggu perkembangan. Sekarang baru P-18, dan kami minta penyidik melengkapi, dan nanti kalau sudah P-21 (hasil penyelidikan sudah lengkap) akan kami kabarkan," ujar jaksa yang mantan staf Seksi Intel Kejari Jembrana ini.

Sementara Kanit Tipikor Satreskrim Polres Jembrana, Iptu Putu Merta, ketika dikonfirmasi terpisah Jumat kemarin, membenarkan, pihaknya tengah berusaha mengajukan berkas dua tersangka lain dalam korupsi korupsi dana santunan kematian Pemkab Jembrana tahun 2015 itu. Ia pun mengaku telah men-

dengar informasi, jika berkas kedua tersangka bersangkutan masih dinyatakan P-18. "Ya nanti kami menunggu petunjuk Jaksa. Apa-apa yang perlu dilengkapi, kalau sudah dilengkapi, kembali diajukan," ujarnya.

Menurutnya, dua tersangka lain yang berkas perkaranya tengah berusaha digulirkan ke Kejari Jembrana itu, masing-masing berinisial I Gede A yang mantan Kelian Banjar Munduk Ranti, dan I Dewa Ketut A yang mantan Kelian Banjar Sarikuning Tulung Agung. Selain dua mantan Kelian Banjar di Desa Tukadaya, pihaknya mengakui, juga sempat mengendus keterlibatan tiga mantan Kaling di Kelurahan Gilimanuk, Ke-

camatan Melaya, dan seorang mantan Kaur di Desa Baluk, Kecamatan Negara, dalam kasus korupsi dana santunan kematian tersebut.

Namun untuk ketiga mantan Kaling dan seorang mantan Kaur yang diketahui sudah melakukan pengembalian Kerugian Negara sebelum proses penyelidikan, itu belum ada ikut terseret sebagai tersangka. Sedangkan dua mantan Kelian Banjar di Desa Tukadaya yang telah ditetapkan tersangka, tidak ada mengembalikan Kerugian Negara. "Nanti tunggu perkembangan. Kami belum bisa katakan, apakah ada tersangka lain lagi atau tidak," pungkasnya. **ode**

Edisi : Sabtu 25 Ags.

Hal :



BPK Periksa Pengelolaan JKN-KIS



• IST
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menerima Tim BPK RI Perwakilan Bali di ruang rapat Bupati Klungkung, Senin (20/8).

SEMARAPURA, NusaBali

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali yang dipimpin IGN Satria Perwira di Ruang Rapat Bupati, Senin (20/8). Kedatangan tim berjumlah enam orang ini untuk memeriksa kinerja tematik Pemkab Klungkung.

IGN Satria Perwira saat bertemu Bupati Suwirta mengatakan, timnya datang ke Klungkung akan melaksanakan tugas pemeriksaan pendahuluan selama 20 hari ke depan. IGN Satria Perwira menambahkan, pihaknya bersama tim akan melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik terhadap pengelolaan JKN-KIS yang dibiayai Pemkab Klungkung yang

nantinya berfokus pada sumber daya pengelola JKN-KIS tersebut. "Kami (BPK) akan melaksanakan pemeriksaan pendahuluan selama 20 hari ke depan. Karena pemeriksaan kinerja, intinya kami akan memeriksa efektivitas pengelolaan dari JKN-KIS khususnya di Dinas Kesehatan dan rumah sakit," jelasnya.

IGN Satria Perwira juga berharap dukungan dan kerjasama dari Pemkab Klungkung selama proses pemeriksaan berlangsung.

Bupati Suwirta dalam kesempatan tersebut memerintahkan OPD agar terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, termasuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan selama berjalannya JKN-KIS di Klungkung. Bupati juga meminta kepada OPD yang akan diperiksa untuk mempersiapkan dokumen-dokumen materi pemeriksaan. **wan**

Edisi : Selasa, 21 Agustus 2018

Hal : 8



45 SD di Buleleng Terima Bantuan Buku

Pengadaan buku ini semua juknisnya ada di Kemendikbud, sudah ditentukan semuanya.

SINGARAJA, NusaBali

Sebanyak 45 SD di Buleleng mendapat bantuan pengadaan buku dari Kemendikbud RI. Ribuan buku yang sudah sampai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga (Disdikpora) Buleleng ini menjalani proses verifikasi bersama pada, Sabtu (18/8).

Kepala Disdikpora Buleleng, Gede Suyasa menerangkan, pengadaan buku dari pemerintah pusat menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Buleleng tahun ini mendapatkan jatah pengadaan buku referensi per-

pustakaan sebesar Rp 2,2 miliar. Namun setelah menjalani proses tender, anggaran yang terpakai hanya Rp 1,7 miliar.

"Pengadaan buku ini semua juknisnya ada di Kemendikbud, sudah ditentukan semuanya, buku apa saja sesuai dengan SK yang diterbitkan. Daerah hanya diberikan kebebasan mengatur 10 persen diantaranya khusus untuk muatan lokalnya saja," kata dia.

Pihaknya pun mengatakan sebelum dibawa ke masing-masing sekolah yang tersebar di sembilan kecamatan di Buleleng, ribuan buku-buku itu akan menjalani proses verifikasi selama tiga hari kedepan. Jika ditemukan buku yang tidak sesuai dengan SK dan tidak memiliki nomor Internasional Standard Book Number (ISBN), dan dalam kondisi rusak dapat dikembalikan.

Suyasa pun menjelaskan pros-

es verifikasi buku tersebut disaksikan oleh Kejaksaan, Inspektorat dan juga pihak kepolisian. Sementara itu dalam penetapan jumlah sekolah yang mendapat

bantuan pengadaan disesuaikan dengan jatah kuota yang diberikan dari pemerintah pusat.

Selain itu sekolah yang menerima bantuan pengadaan

buku referensi perpustakaan itu minimal harus memiliki gedung perpustakaan, rak buku dan jumlah siswa lebih dari 60 orang. Dengan adanya persyaratan tersebut masih ada 141 sekolah yang belum dapat bantuan pengadaan buku. Karena belum memiliki gedung perpustakaan dan jumlah siswa kurang dari 60 orang.

"Memang ada yang gugur karena belum punya gedung perpustakaan dan juga siswanya sedikit, tetapi untuk pemenuhan gedung terus dilakukan bertahap," ungkap dia. Sementara itu bantuan pengadaan buku kepada 45 sekolah ini pun diharapkan dapat menunjang literasi sekolah, meski sebelumnya sudah berjalan. Koleksi buku yang lebih banyak diharapkan dapat menjadi pilihan yang lebih banyak pada siswa untuk meningkatkan minat baca. **k23**



• NUSABALI/LILIK SURYA

VERIFIKASI pengadaan buku dari Kemendikbud kepada 45 SD di Buleleng di Disdikpora Buleleng, Sabtu (18/8).

Edisi : Senin, 20 Agustus 2018

Hal : 5



Badung Tambah Koleksi Buku Perpustakaan SD Senilai Rp 12,4 M

MANGUPURA, NusaBali

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung menggelontorkan anggaran sebesar Rp 12.450.000.000 untuk pengadaan buku-buku referensi pada tahun 2018. Pengadaan ini dalam rangka menambah koleksi buku di perpustakaan sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar (SD). Anggaran pengadaan buku bersumber dari APBD Badung tahun 2018.

Saat ini pengadaan buku dimaksud tengah dalam tahap lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PLSE). Lelang dibuka pada Jumat (10/8) lalu dan ber-

akhir pada 22 Agustus 2018 mendatang.

"Pengadaan buku yang kami lakukan adalah buku-buku ilmu pengetahuan umum, agama, dan lain-lain. Untuk bahan bacaan siswa sebenarnya, jadi ini di luar buku mata pelajaran," tutur Kepala Disdikpora Badung I Ketut Widia Astika, Minggu (12/8).

Buku-buku dimaksud nantinya akan diserahkan kepada seluruh SD se-Badung. Khususnya sekolah negeri yang saat ini tercatat ada 249 SD negeri. "Kami melihat buku di perpustakaan sekolah (SD) kebanyakan sudah tidak lagi relevan dengan pembelajaran atau kurikulum kita seka-

rang (kurikulum 2013). Makanya, kami punya inisiatif untuk menambah koleksi buku yang ada di perpustakaan sekolah supaya lebih relevan," kata pejabat asal Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, itu.

Pengadaan buku ini adalah kali pertama dilakukan. "Iya, ini (pengadaan buku) baru pertama kali. Karena begini, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dikelola sekolah itu sudah ada ketentuan untuk apa saja. Nah, yang tidak bisa dilakukan dana BOS, tentu kami bantu dari APBD termasuk pengadaan buku ini. Begitu juga nanti anggaran pemeliharannya kami akan siapkan," tegasnya. asa

Edisi : Senin, 13 Agustus 2018

Hal : 2